BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan segala jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan negara (widodo,2010:1).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini pun diungkapkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, Prof. Dr. P.J.A Adriani mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan

umum (Undang – Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pemahaman penulis bahwa pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (rutin dan membangun) bagi kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan pajak merupakan sumber pendapatan yang memiliki komposisi terbesar dari seluruh pendapatan yang diterima oleh negara.

Berbagai kasus menyeret aparat pajak dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan skeptisme masyarakat mengenai kepercayaan masyarakat terhadap KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Seperti tertangkapnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak, dengan inisial MD dan ED dalam menawarkan kepada yang berinisial HT selaku Kepala Bagian Keuangan PT Nusa Raya Cipta. Kasus Pajak perusahaan itu ditangani oleh MD dan ED. Sebagaimana yang diungkapkan. (www.kompas.com)

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Tahun 2007-2014
(dalam milyar)

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak	Tax Ratio Diukur Dari Penerimaan Pajak Pusat Terhadap PDB (%)
2007	490,9	12,4
2008	658,7	13,3
2009	619,9	11,0
2010	722,9	11,2
2011	873,3	11,76
2012	980,5	11,9
2013	1148,3	12,2
2014	1246	12,3

Sumber : Departemen Keuangan

Sesuai dengan perkembangan ekonomi terkini dan juga arah kebijakan perpajakan, penerimaan pajak ditargetkan Rp 1.246 Milyar dalam APBN-P tahun 2014 dengan *tax ratio* diukur dari penerimaan pajak pusat terhadap PDB yaitu sebesar 12,3 % sedangkan target *tax ratio* di 2014 adalah 14%. Apabila dibandingkan dengan realisasi perpajakan tahun 2013, target tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 97,7 Milyar. Relatif tingginya perkembangan ekonomi tahun 2014 menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya penerimaan

perpajakan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui pemeriksaan, penagihan dan peningkatan pengawasan penerimaan.

Tahun 2011 saat Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur memeriksa pajak PT The Master Steel. “Mereka kemudian menemukan Bukti permulaan kesalahan pajak berupa pelaporan pajak transaksi senilai Rp 1.003.000.000.000,- (satu triliun tiga miliar) yang dicatat sebagai pinjaman dari berinisial AS, warga Singapura.” Ujar jaksa Ahmad Burhanuddin di Pengarilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/7/2013).

PT The Master Steel ini kemudian dianggap jaksa sengaja menutupi transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang seharusnya dicatat sebagai penerimaan. Hal ini dilakukan agar pembayaran pajak tahun 2008 tidak sebesar yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Jaksa melanjutkan, pada Juni 2011, inisial D mengakui kesalahan dan membayar pajak terhutang ditambah denda 150% sebesar Rp 165 miliar. Setelah ada pembayaran, Tim Bukti Permulaan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Kanwil DJP Jaktim yang berinisial HD. Yang kemudian diberikan arahan untuk melakukan, pengujian transaksi penjualan terhadap dokumen dan proses transaksi.

Kemudian, pengecekan data pembeli agar mekanisme penyelesaian temuan pelanggaran oleh PT The Master Steel, dapat diterima sebagai ketentuan pasal 8 ayat 3 UU Nomor 28 tahun 2007, serta membuka rekening PT The Master Steel melalui izin Menteri Keuangan.

Desember 2012, pihak PT The Master Steel tidak bersedia memberikan keterangan atau data-data transaksi Rp 1.003 miliar. Sehingga Kanwil Pajak Jaktim menerbitkan surat perintah penyidikan pada 2 April 2013 untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan atas nama tersangka yang berinisial DS, IB dan ND. “Penyidikan ini diketuai MDI dan lima anggotanya, salah satunya, ED,” kata Jaksa Burhanuddin.

Pada 25 April 2013, DS mengadakan pertemuan dengan ED, MDI dan Konsultan Pajak The Master Steel, berinisial RH, di Restoran lantai III Hotel Borobudur, Jakarta. MDI, kata Ahmad, kemudian meminta bantuan ED dan MDI, agar penyidikan yang disangkakan kepadanya dihentikan dengan kesepakatan imbalan Rp 40 miliar. “DS memerintahkan EK untuk mengatur cara penyerahannya,” lanjut Jaksa.

Kemudian, Jaksa menyebutkan, pada 7 Mei 2013 dan 15 Mei terjadi penyerahan uang kepada ED dan MDI di sekitar parkir Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Penyerahan uang melalui EK dan TD kepada ED dan MDI. “Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP,” kata jaksa.

Kemudian, untuk dakwaan kedua, MDI diancam pidana Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas dakwaan ini MDI dan Tim Penasehat Hukumnya

tidak mengajukan pembelaan. Untuk itu, sidangpun akan kembali dilanjutkan pada 16 Agustus 2013 untuk mendengar keterangan saksi (Ary/Ism).

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan, metode yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak adalah mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, Bambang membantah dugaan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan tarif pajak dan menambah objek maupun subjek pajak.

“Masalahnya sejak 2012, kinerja penerimaan pajak Indonesia jelek sekali. Bukan karena perekonomian jelek, tapi karena *tax administration* atau pengumpulan pajak yang lemah,” keluh dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Bambang menyebutkan, ada tiga penyebab buruknya pengumpulan pajak selama belasan tahun ini. Pertama, kepatuhan WP sangat rendah yaitu hanya sekitar 50 persen. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis WP yang kecil.

“Meski jumlah penduduk 250 juta orang, yang punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 28 juta orang atau sedikit di atas 10 persen. Yang menyampaikan SPT rutin hanya 10 juta WP dan yang membayar penuh sesuai ketentuan Cuma 900 ribu orang.” Jelasnya.

Menurut Bambang Kasubag Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang (2014) mengatakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak menyetorkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan dengan perhitungan, menghitung, menyetor dan pelaporan dengan tidak benar dikarenakan tingkat pemahaman tentang perpajakan masih rendah.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan terbesar negara. Selama lima tahun terakhir penerimaan perpajakan memberikan kontribusi lebih dari 70% dari total penerimaan dalam negeri. Bahkan pada tahun 2013, penerimaan pajak hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (APBN Kementerian Keuangan RI). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009) sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dimaksud dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berbagai upaya untuk terus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan *Tax Reform* (Widodo, 2010:2).

Tax Reform adalah reformasi perpajakan yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan Indonesia. Langkah lain yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah melakukan perubahan dalam sistem pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan penyempurnaan organisasi dengan membuat KPP Modern. Sebelum modernisasi pajak dilakukan terdapat beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang dibentuk berdasarkan jenis pajaknya, yaitu Kantor Pelayanan Pajak yang

menangani Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan nilai (PPn), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) yang khusus menangani permasalahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Kantor Karikpa (Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak) yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bahkan jika ada pemohon keberatan juga dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu, pelayanan pada saat KPP sebelum modern tidak menerapkan pelayanan satu atap (*one stop service*) karena KPP dibagi berdasarkan jenis pajak. Hal tersebut tidak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Keadaan seperti itu mendorong DJP untuk melakukan modernisasi dengan membuat KPP modern. Kantor Pelayanan Pajak Modern diawali dengan dibentuknya Kantor LTO (*Large Taxpayer Office*), biasa disebut dengan KPP WP Besar menangani 300 wajib pajak badan terbesar di seluruh Indonesia. Kedua, dibentuklah Kantor MTO (*Medium Taxpayer Office*) yang kemudian lebih sering disebut dengan nama KPP Madya menangani 200-500 WP Badan terbesar di lingkungan kanwilnya. Langkah ketiga adalah pembentukan Kantor STO (*Small Taxpayer Office*) yang biasa dikenal dengan sebutan KPP Pratama. Terciptanya KPP Modern membuat DJP senantiasa memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, untuk mencapai pelayanan prima, DJP memberikan pelayanan ekstra yaitu dengan membentuk *Account Representative* di setiap KPP Modern.

Account Representative adalah petugas yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang sudah menerapkan sistem administrasi modern. *Account Representative* merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berperan sebagai penghubung antara wajib pajak dengan DJP. Memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam mengamankan penerimaan negara.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KMK.01/2006 tugas-tugas *Account Representative* adalah melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisa kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intersifikasi, melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi AR yang secara langsung berhubungan dengan Wajib Pajak tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran diri Wajib Pajak, sehingga dengan kerelaan hati dapat meningkatkan kepatuhan mereka akan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pajak sebagai sumber utama dana penerimaan dalam negeri yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan Negara lainnya berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak, yang nantinya penerimaan Negara itu dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penerimaan negara dengan melakukan reformasi di bidang perpajakan. Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa undang – undang perpajakan yang fokusnya utamanya mengubah sistem pemungutan perpajakan. Bentuk pembaharuan yang mendasar yaitu Undang – Undang tentang *Self Assessment System*. Reformasi perpajakan dimulai tahun 1983, *Self Assessment System* ini adalah metode yang diterapkan untuk memberi tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak (WP) yang mana untuk memenuhi kewajiban membayar pajak semua prosedur dan tahapannya dilakukan sendiri oleh pihak yang wajib membayar pajak tersebut. Dalam metode ini, pihak yang wajib membayar pajak harus menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Oleh karena itu, dalam *Self Assessment System* ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data ini akan digunakan untuk membuktikan bahwa penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak sudah benar. Apabila diketahui masih salah, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi.

Kepatuhan wajib pajak merupakan cerminan dari pelaksanaan *Self Assessment System* yang berlaku di Indonesia (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menurut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, di mana segala pemenuhan kewajiban perpajakan

dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Siti Kurnia Rahayu,2010:137). Direktur Penghasilan Kena Pajak (PKP) Dasto Ledyanto (2012) mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum mau menjalani amanat undang-undang tersebut (Direktur Penghasilan Kena Pajak Dasto Ledyanto, 2012). Dari sisi penyedia jasa profesional, Dasto mengatakan masih banyak perusahaan atau orang pribadi yang tidak menyetorkan pajak pegawai sesuai dengan ketentuan seperti Menghitung, menyetor dan melaporkan dengan benar tidak dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan atau orang pribadi (Direktur Penghasilan Kena Pajak, Dasto Ledyanto, 2012)

Siti Kurnia Rahayu menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat, *Good Governance* merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini (Siti Kurnia Rahayu,2010:109). Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu,2010:109). Untuk mencapai penerapan pelayanan ini adalah dengan melakukan percepatan penyelesaian dari ke delapan jenis pelayanan tersebut (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: 2009). Untuk penerapan layanan ini maka ditunjuklah *Account Representative*, yaitu aparat pajak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan dan pengawasan secara langsung untuk sejumlah Wajib Pajak tertentu yang telah ditugaskan kepada *Account Representative*

(Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: 2009). Bagi Wajib Pajak, *Account Representative* berfungsi sebagai komunikator sekaligus sebagai wakil dari citra kantor pajak (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: 2009). Pada prinsipnya, seluruh Wajib Pajak akan memiliki *Account Representative* yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa wajib pajak memperoleh hak-haknya secara transparan sehingga Wajib Pajak patuh terhadap kewajibannya (Peraturan Direktorat Jenderal Pajak: 2009).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yudi Achmad Apandi Tahun 2014 dengan judul Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Soreang. Yang berarti variabel independen adalah *Self Assessment System* sebagai (X1) dan *Account Representative* (X2) serta variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Populasi Penelitian tersebut diambil dari satu KPP dan sampel sebanyak 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Soreang. Penelitian yang dikemukakan Yudi ditemukan hasil analisis yang *Self Assessment System* dan *Account Representative* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang artinya terdapat pengaruh yang kuat antara *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *Self Assessment System* dan *Account Representative* pada KPP Pratama Soreang telah berjalan dengan cukup baik.

Adapun pengembangan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian terdahulu yaitu responden. Populasi yang diperoleh dari penelitian terdahulu lebih

menekankan pada responden *Account Representative* itu sendiri, sehingga pengembangan yang dilakukan oleh penulis adalah memberikan kuesioner kepada wajib pajak untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonagara.

Mencermati uraian di atas, dengan substansi mengenai *Self Assessment System* dan *Account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana pembentukan *Self Assessment System* dan *Account representative* yang telah diterapkan oleh Menteri Keuangan sejak tahun 2006 pada Kantor Pelayanan Pajak Modern, serta berusaha untuk menelaah pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Pengaruh *Self Assessment System* Dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Survey Pada Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Permasalahan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu :

1. Bagaimana *Self Assessment System* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

2. Bagaimana *Account Representative* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
3. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
4. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
5. Seberapa Besar Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
6. Seberapa Besar Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui *Self Assessment System* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
2. Untuk mengetahui *Account Representative* yang dijalankan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
3. Untuk mengetahui Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

4. Untuk Mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
5. Untuk Mengetahui Pengaruh *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara
6. Untuk Mengetahui Pengaruh *Self Assessment System* dan *Account Representative* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan sistem perpajakan terutama dalam masalah penerapan *Self Assessment System* dan *Account Representative* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terutama dalam hal sistem perpajakan.
3. Bagi Pihak Lain, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi penambah informasi dan wawasan yang berguna bagi yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melaksanakan penelitian kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan.